

## ABSTRAK

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi. Sebagaimana diketahui pada pokoknya penyelesaian terhadap tindak pidana melalui hukum acara pidana terdiri dari tindakan penyelidikan, tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan serta pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan dasar hukum yang digunakan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau bahan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan. dengan cara analisis kualitatif penulis menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan bermotor wewenang langkah yang di ambil oleh pihak penyidik yaitu: Menerima laporan, Melakukan tindakan pertama, melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, pengentian penyidikan, dan menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum. Dasar hukum kepolisian yang digunakan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dasar hukum yang paling utama yaitu pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci: Kepolisian, Pencurian, Kendaraan Bermotor**

## **ABSTRACT**

*The crime of motor vehicle theft is a type of crime that has high mobility. As is known, in essence the settlement of criminal acts through criminal procedural law consists of investigative actions, prosecutive actions, prosecution and examination before court trials and the implementation of sentencing in correctional institutions. This writing aims to determine the authority of the police in conducting investigations and investigations of criminal acts of motor vehicle theft and the legal basis used in investigations and investigations of criminal acts of motor vehicle theft.*

*The approach method used in this study is a normative juridical approach, which is a legal research method carried out by researching library materials or secondary materials. Data analysis was carried out qualitatively, namely by research procedures that produced descriptive data in the form of written or spoken words. by means of qualitative analysis the author uses the inductive method.*

*The results showed that the police authority in the process of investigating and investigating motor vehicle theft authorized the steps taken by the investigators, namely: Receiving reports, taking the first action, making arrests, detentions, and confiscations, taking fingerprints and photographing suspects, conducting examinations of witnesses. and suspects, terminate the investigation, and submit the minutes of the investigation to the public prosecutor. The legal basis of the police used in the investigation and investigation of the crime of motor vehicle theft is the most important legal basis, namely Article 362 of the Criminal Procedure Code and Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. Police are all matters relating to the functions and institutions of the police in accordance with statutory regulations.*

**Keywords: Police, Theft, Motor Vehicles**